

SILABUS

NAMA MATA KULIAH : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN)

KB.342122

SKS MATA KULIAH : .2 SKS / 3 Rombel

DESKRIPSI SINGKAT

MATAKULIAH : Mata kuliah ini memberikan bekal pengetahuan mengenai Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara, perbedaan eksistensinya menurut sistem hukum Anglo Saxon dan sistem Hukum Kontinental, susunan kekuasaan kehakiman, khususnya PTUN, Pengertian, Kompetensi dan kewenangan mengadili, Dasar Hukum Acara PTUN, tata cara berperkara dan proses beracara di PTUN, Subyek dan Obyek PTUN, alur sengketa TUN, Surat gugatan, Pembuktian, Putusan, pelaksanaan Putusan dalam Hukum Acara PTUN serta upaya hukum yang meliputi perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Didiskusikan pula berbagai kasus aktual di bidang Peradilan Tata Usaha Negara.

STANDAR

KOMPETENSI : Tujuan umum mata kuliah Hukum Acara PTUN ini adalah agar mahasiswa mampu secara teoritis dan praktis memahami aturan tentang cara bertindak dan bersengketa maupun beracara di PTUN.

KOMPETENSI

DASAR : Memperoleh pemahaman mengenai persoalan-persoalan yang menjadi bidang kajian Hukum Acara PTUN dan mendapatkan kejelasan serta uraian mengenai Dasar hukum pembentukan PTUN; struktur organisasi kantor PTUN; tujuan dibentuknya PTUN; prinsip dasar dan asas Hukum Acara PTUN; kriteria untuk menentukan kedudukan Badan atau Pejabat TUN; kekuasaan kehakiman dilingkungan PERATUN; cara-cara mengajukan gugatan ke PTUN; proses pemeriksaan di persidangan; penundaan pelaksanaan keputusan TUN; rapat permusyawaratan; pemeriksaan persiapan; pemeriksaan dengan acara biasa; pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat; putusan; upaya hukum dan eksekusi.

PENGALAMAN

BELAJAR

- Membicarakan uraian mengenai Dasar hukum pembentukan PTUN; struktur organisasi kantor PTUN; tujuan dibentuknya PTUN Kompetensi PTUN dan kewenangan mengadili, pengertian dan istilah dalam HA PTUN, prinsip dasar dan asas

HA PTUN; kriteria untuk menentukan kedudukan Badan atau Pejabat TUN,

- Mendiskusikan teori dan wacana lisan menggunakan berbagai media terkait dengan PTUN serta Peraturan Perundang-undangan terkait dengan sistem peradilan di Indonesia
- Menuliskan dalam bentuk makalah ilmiah isi wacana lisan secara umum mengenai tatacara bersengketa atau beracara di PTUN dan memaparkannya di depan kelas dalam kerja kelompok
- Memahami dasar dan alasan pengajuan gugatan
- Mendiskusikan teori dan wacana tulis mengenai tindakan sebelum mengajukan gugatan, putusan dan pelaksanaan putusan serta upaya hukum yang dapat ditempuh dengan menentukan informasi rincinya melalui resume individual
- Secara individu membuat surat gugatan PTUN.

INDIKATOR/TUJUAN

PEMBELAJARAN : Sebagai Mata Kuliah dasar keahlian, HA PTUN bersifat teoritik dan praktik, diharapkan agar mahasiswa dapat memahami tentang perbuatan yang dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat berkenaan dengan perbuatan pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingannya demi terjaminnya Kepastian Hukum serta memberikan ketrampilan kepada mahasiswa untuk menganalisa dan merealisasikan materi teoritis dalam praktik beracara di PTUN

PRASYARAT : Untuk dapat mengikuti mata kuliah ini mahasiswa harus telah menempuh dan lulus mata kuliah PIH, PHI, dan Ilmu Negara, dan Hukum Tata Negara terlebih dahulu

PENILAIAN : Komponen penilaian selama perkuliahan, jenis tagihannya adalah; Review atas suatu masalah, resume buku/makalah/teori kuliah, praktek beracara, makalah kelompok, makalah individual dan diskusi (FGD) serta Ujian Mid Semester dan Ujian Akhir Semester.

ALOKASI WAKTU : 2 x 50 Menit, 15 x pertemuan

SUMBER :

1. Abdullah, Rozali, 1996, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
2. Djenal Hoesen Koesoemahatmodjo, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni.
3. Ewan, Suparman, 2004, *Kitab UU Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Fokus Media.

4. Mangkudilaga, Benyamin, 1988, *Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Angkasa
5. Lopa, B. Dan Hamzah, 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
6. Indroharto, 1999, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
7. Indroharto, 2003, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan.
8. Koentjoro Porbopranoto, 1985, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
9. Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty, Jogjakarta.
10. Rochmat Soemitro, 1987, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung; Eresco
11. Rozali Abdullah, 1991, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
12. SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta; Liberty
13. Siti Soetami A, 2005, *Hukum Acara PTUN*, Bandung: Refika Aditama
14. Sjahran Basjah, 1984, *Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia (Disertasi)* UNPAD, Bandung.
15. Suwarma Al Muchtar, 1999, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Epsilon Grup
16. Sumitro, 1997, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni
17. Wicipto Setiadi, 1997, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Perbandingan)*, Jakarta: Rajawali Press
18. W. Riawan Tjandra, 1995, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya.
19. Zairin Harahap, 1997, *Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

SILABUS

Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
Mata Kuliah : Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN)

Semester/SKS : 6 / 2 SKS
Rombel : 1, 2, 3

No	Kompetensi	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Estimasi Waktu (menit)	Daftar Kepustakaan
	1	2	3	4	5
1	Memahami Susunan Organisasi Kekuasaan Kehakiman, PTUN, Tujuan pembentukan, Pengertian dan Dasar Hukum serta susunan dan tempat kedudukan PTUN maupun PTTUN	1. Pendahuluan	1. Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara, perbedaan eksistensinya menurut sistem hukum Anglo Saxon dan sistem Hukum Kontinental 2. Susunan Organisasi Kekuasaan Kehakiman, PTUN, Tujuan pembentukan, Pengertian dan Dasar Hukum serta susunan dan tempat kedudukan PTUN, PTTUN	2 x 50 2 x 50	§ Djenal Hoesen Koesoemahatmodjo, 1986, <i>Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara</i> § Rochmat Soemitro, 1987, <i>Peradilan Tata Usaha Negara</i> § Suwarma Al Muchtar, 1999, <i>PTUN</i> § Sumitro, 1997, <i>PTUN</i>
2	Memahami teori dan wacana lisan menggunakan berbagai media terkait dengan Pengertian dan Asas Hukum Acara PTUN, Kompetensi PTUN, Subyek dan Obyek sengketa TUN, Keputusan yang tidak termasuk KTUN	1. Pengertian Dasar Hukum Acara PTUN	1. Pengertian dan Asas HA PTUN, Kompetensi PTUN, Subyek dan Obyek sengketa TUN serta Keputusan yang tidak termasuk KTUN 2. Penyelesaian Sengketa TUN, Upaya administratif, Upaya Peradilan dan Penunda-an Pelaksanaan Keputusan TUN 3. Tugas Mendiskusikan teori dan wacana tulis dengan menentukan informasi rincinya melalui resume individual	2 x 50 2 x 50 2 x 50	§ Abdullah, Rozali, 1996, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i> § Zairin Harahap, 1997, <i>Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara</i> § Siti Soetami A, 2005, <i>Hukum Acara PTUN</i> § Wicipto Setiadi, 1997, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Suatu Perbandingan)</i>
3	Memahami surat gugatan dan mampu menjelaskan isi surat gugat serta membuatnya	1. Gugatan ke PTUN	1. Definisi dan unsur Surat Gugatan, tuntutan dalam gugatan serta teknik membuat posita dan petitum 2. Alasan mengajukan gugatan, syarat gugatan, akibat hukum bila syarat tidak terpenuhi, tenggang waktu, membayar uang perkara dan permohonan beracara dengan cuma-cuma 3. Praktek membuat surat gugat	2 x 50 2 x 50 2 x 50	§ Sri Soemantri, 1987, <i>Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi</i> . § Rozali Abdullah, 1991, <i>Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara</i> § SF.Marbun, 1997, <i>Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia</i> § Indroharto, 2003, <i>Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PTUN</i>

4	Memahami dan dapat menjelaskan prosedur pemeriksaan dengan acara cepat, singkat dan biasa	1. Pemeriksaan Pokok Sengketa di PTUN	1. Pemeriksaan persiapan, pemeriksaan dengan acara singkat, cepat dan biasa 2. Beracara dengan wakil atau kuasa hukum 3. Tugas kelompok mencari berkas perkara di PTUN serta mendiskusikannya dalam kelas	2 x 50 2 x 50 2 x 50	§ Zairin Harahap, 1997, <i>Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara</i> § Siti Soetami A, 2005, <i>Hukum Acara PTUN</i> § Rozali Abdullah, 1991, <i>HAPTUN</i>
5	Memahami alat-alat bukti dan beban pembuktian di PTUN	1. Pembuktian	1. Definisi dan ruang lingkup, Alat-alat bukti, luas dan beban pembuktian, pembagian beban pembuktian	2 x 50	§ Zairin Harahap, 1997, <i>Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara</i> § Siti Soetami A, 2005, <i>Hukum Acara PTUN</i>
6	Memahami Pengertian, isi dan susunan isi putusan, biaya perkara serta eksekusi putusan PTUN	1. Putusan dan Pelaksanaan Putusan	1. Pengertian, macam-macam dan unsur putusan, isi dan susunan isi putusan, biaya perkara dan eksekusi	2 x 50	§ Zairin Harahap, 1997, <i>Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara</i> § Siti Soetami A, 2005, <i>Hukum Acara PTUN</i>
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Upaya-upaya Hukum di PTUN	1. Upaya-upaya Hukum di PTUN	1. Perlawanan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali 2. Secara individu membuat makalah ilmiah tentang Studi Kasus Sengketa PTUN di Indonesia)	2 x 50 2 x 50	§ Zairin Harahap, 1997, <i>Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara</i> § Siti Soetami A, 2005, <i>Hukum Acara PTUN</i>

Semarang, 30 Juli 2008

Mengetahui/menyetujui:
Pembantu Dekan I,

Penyusun,
Assisten Dosen HA PTUN,

Drs. Suhadi, M.Si.
NIP.

Arif Hidayat, SHL., MH.
NIP. 132327 001

